

I S S N : 2443 - 0536

Volume V | Nomor 3 | Mei 2019

STIPRO

STINDO PROFESIONAL JURNAL

EKONOMI, HUKUM, PERTANIAN, TEKNIK,
KEDOKTERAN, KESEHATAN, AGAMA,
PENDIDIKAN, KOMPUTER, SOSIAL POLITIK,
PETERNAKAN, PARIWISATA, SENI, BAHASA



STINDO PROFESIONAL

Volume V | Nomor 3 | Mei 2019

(Menerima Tulisan dari Berbagai Disiplin Ilmu, Ekonomi, Hukum, Pertanian, Teknik, Kedokteran, Kesehatan, Agama, Pendidikan, Komputer, Sosial Politik, Peternakan, Pariwisata, Seni, Bahasa)

ISI TULISAN DI LUAR TANGGUNG JAWAB PENERBIT & REDAKSI

Penanggung Jawab / Pengarah :

Dr. Saut Purba, M.Pd.

Dr. Keysar Panjaitan, M.Pd.

Pimpinan Redaksi :

Drs. Harkim Simamora, SE, M.Si.

Wakil Pimpinan Redaksi :

Jhonson Rajagukguk S.Sos., SE., M.AP

Sudung Marpaung SE.

Redaktur Ekonomi

Edison Parulian Hutauruk SE., M.Si.

Rezekia Vaizal Simanungkalit, SE., MM.

Sabaruddin Chaniago SE., MM.

Redaktur Sosial Politik

Drs. Maringan Panjaitan, M.Si.

Redaktur Pertanian & Peternakan

Ir. Bezalel Siagian, M.Si.

Dr. Ir. Tumiur Gultom, MP

Redaktur Hukum

Dr. Cakra Arbas MHI., MH.

Permai Yudi SH., MH.

Redaktur Teknologi

Drs. Parapat Gultom MSIE., Phd.

Parulian Siagian ST., MT.

Roni Jhonson Simamora ST., M.Cs.

Redaktur Pendidikan

Dra. Erlinda Simanungkalit M.Pd.
Dra. Risma Sitohang M.Pd.

Redaktur Kedokteran

dr. Horas Rajagukguk, S.pB FINACS

Redaktur Pariwisata

Furgan, SE., MM.Par

Redaktur Agama

Robinhot Sihombing, MPdK
Pdt. Benget Rumahorbo M.Th

Redaktur Kesehatan

Parmin, SKM, M.Kes

Redaktur Keolahragaan

Imanuddin Siregar, M.Pd

DAFTAR ISI
JURNAL STINDO PROFESIONAL
ISSN : 2443:0536
Volume V | Nomor 3 | Mei 2019

- Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan Ditinjau Dari Segi Implementasi Kebijakan Di Kelurahan Tangkahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan 1-9
Oleh : Artha Lbn. Tobing
Dosen Prodi ADM. Negara UHN Medan
- Pengaruh Pemasaran Relasi Terhadap Penjualan Produk Turunan Andaliman 10-20
Oleh : Ridhon MB. Simangunsong, SE, MMA
Prodi Adm. Bisnis UHN Medan
- Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pada Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Cabang Berastagi 21-29
(Effect Of Leadership On Work Achievement In Tirtanadi Pdam Province North Sumatera Branch Berastagi)
Oleh : Ingan Ukur Br Sitepu, SE.M.M
Dra. Menanti Br Sembiring, M.M
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Quality
- Analisis Kepuasan Pengunjung Di Hotel Grand Orri Djamin Ginting Berastagi Menggunakan Metode Regresi Berganda 30-48
Oleh : Darnianti, S.T.,M.T
Dosen Fakultas Teknik Universitas Quality
Email : darnianti83@gmail.com
- STRATEGI KULTUR TEHNIK PENGELOLAAN GULMA PERKEBUNAN 49-54
Oleh : Ir.Bukti Hasiholan, M.Si
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Quality
- Implementation Of Language Attitude And Turn-Taking Of The President Candidate's Supporter At Mata Najwa TV Talk Show 55-64
Oleh : Melda Veby Ristella Munthe, M.Pd,
Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd
(Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar)
- Peranan Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Di Buana Mandiri Medan 65-77
Oleh : Rejekia Vaizal Simanungkalit,SE.,MM
- Perbedaan Pengaruh Latihan Cross Court Dan Latihan Down The Line Return To Center Mark Terhadap Kelincahan Dan Kemampuan Groundstroke Dalam Permainan Tennis Lapangan Pada Siswa Sekolah Tennis Progress Unimed 78-88
Oleh: Imanuddin Siregar, M.Pd
Dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

Penerapan Metode Technique for Others Preference by Similary to Ideal Solution (TOPSIS) Untuk Pemilihan Lokasi Tempat Karaoke Oleh : Florida Nirma Sanny Damanik, ST, MM (Dosen STMIK Mikroskil Medan)	89-97
---	--------------

**ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DITINJAU DARI
SEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI KELURAHAN TANGKAHAN MARTUBUNG
KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Oleh :

Artha Lbn. Tobing

Dosen Prodi ADM. Negara UHN Medan

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari masalah penelitian, yakni bagaimanakah implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam pembangunan kelurahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Tangkahan Martubung. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Tangkahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini dianggap sangat relevan dengan materi tersebut serta dapat digunakan untuk menguji krisis suatu teori serta memaknai fenomena. Adapun yang menjadi informan kunci adalah Kepala Lurah Tangkahan Martubung dan informan utama yaitu Sekretaris dan Seksi Pendapatan Kelurahan Tangkahan dan informan tambahan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya Proses pembangunan kelurahan yang didanai oleh dana alokasi yang diterima dari kabupaten/kota dinyatakan belum sepenuhnya digunakan dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan kelurahan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, diantaranya adalah Komunikasi, Sumber daya Manusia (SDM), Struktur organisasi dan sikap para pelaksana. Kedepannya diperlukan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan tersebut dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta memberikan pelatihan kepada para pegawai kantor Kepala kelurahan Tangkahan Martubung.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dan Kelurahan, Pembangunan Kelurahan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Alokasi Dana kelurahan adalah bagian keuangan kelurahan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kota. Maksud pemberian Alokasi Dana kelurahan adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk

mendorong dalam membiayai program pemerintah kelurahan yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana kelurahan ini dapat mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya

pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan ditingkat kelurahan.

Pembangunan adalah proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan.

Partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlakdiperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan program pembangunan kelurahan di titik beratkan pada peningkatan partisipasi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk Penelitian

metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci sebanyak 1 orang dalam penelitian ini yaitu Kepala Kelurahan Tangkahan Martubung.
2. Informan Utama, Dalam ini yang menjadi informan utama sebanyak 2 orang dalam penelitian ini yaitu : sekeretaris kelurahan dan Bendahara (seksi Pendapatan).
3. Informan tambahan, merupakan mereka yang merasakan langsung dalam program Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini diyaitu masyarakat di kelurahan Tangkahan Martubung berjumlah 2 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.

Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipa Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian

kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian.

Uji Reliabilitas dan Validitas

Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kuantitatif).

Uji Reliabilitas Data

Yin mengemukakan bahwa para peneliti kualitatif harus mendokumentasikan prosedur-prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah-langkah dalam prosedur tersebut. Dia juga merekomendasikan agar para peneliti kualitatif merancang secara cermat protokol dan database studi kasusnya.

Uji Validitas Data

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan di Kelurahan Tangkahan Martubung

Sebagaimana disebutkan pada Bab I, penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi UU No.73 pasal 9 Tahun 2005 tentang dana kelurahan atau anggaran kelurahan dengan fokus penelitian mengenai Alokasi Dana kelurahan yaitu Kelurahan Tangkahan Martubung. Penelitian ini

mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kinerja implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Tangkahan Martubung.

Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dibuat untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang dihadapi publik sekaligus mewujudkan suatu kondisi yang diinginkan demi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan publik akan berujung pada tindakan pemerintah yang didukung oleh dua hal, yaitu: sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan nilai-nilai yang ingin dicapai.

Tujuan kebijakan (alokasi dana Kelurahan) tersebut tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh sebab itu, tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting. Disebut penting karena tahapan ini merupakan "jembatan" antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat

sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan baik sosial, ekonomi dan politik.

Sekretaris mengungkapkan bahwa kegagalan maupun keberhasilan implementasi kebijakan tsb tergantung oleh arahan kepala lurah. Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi. Kinerja implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi. Sebagai fokus kajian, kinerja implementasi menjadi bagian yang paling penting dalam studi implementasi.

Kemampuan Aparatur Kelurahan

Kemampuan aparatur kelurahan adalah aparat pemerintah yang berada langsung dibawah camat dan didalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat kemampuan aparatur kelurahan melayani masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Tugas pokok dari lembaga kemasyarakatan ini adalah menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, menumbuhkan dan meningkatkan percepatan pertumbuhan pembangunan kelurahan. Tujuan yang diharapkan dari perencanaan pembangunan adalah adanya suatu pertumbuhan di kelurahan tersebut. Pertumbuhan adalah suatu proses untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik tidak semudah yang kita bayangkan, banyak permasalahan yang timbul dalam proses pertumbuhan kelurahan.

Sekelompok masyarakat yang berada di suatu lingkungan pasti memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi pendidikan, suku maupun agama. bahwa para perangkat kelurahan khususnya kepala kelurahan tanggung jawab yang dimiliki masih kurang baik dalam mengadakan pembangunan, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan sektor pembangunan.

Hal tersebut yang menyebabkan susah untuk mencapai suatu pertumbuhan. Kelurahan Tangkahan Martubung masih dikategorikan desa yang belum terlalu mengalami kemajuan maupun perkembangan karena jika dipandang dari sudut sarana dan prasarana yang disaksikan langsung oleh peneliti di lapangan semuanya masih sangat minim. Adanya dana yang diterima dari Pemerintah Kota sebenarnya mempercepat pertumbuhan Kelurahan karena jika sumber-sumber pendapatan kelurahan saja yang diharapkan tidaklah cukup untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Hal tersebut dapat terealisasi jika pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Masalah di Kelurahan Tangkahan Martubung ini masih kurang terbukanya kepala lurah maupun perangkat lurah dalam penyampaian alokasi dana kelurahan tersebut. Transparan artinya di sini adalah semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Masyarakat ini mengatakan Kalo menurut kemampuan dan tanggung jawab, masih sangat kurang dan tidak jelas sama sekali. Hal tersebut juga menghambat pertumbuhan Kelurahan Berdasarkan keadaan Berdasarkan keadaan di lapangan yang didapat oleh peneliti kelurahan ini masih belum mengalami

pertumbuhan seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri kelurahan yang mengalami pertumbuhan adalah sudah memanfaatkan teknologi baru, masyarakat sangat menghargai pendidikan, dan masyarakat sudah kehidupan di kota. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menghargainya pendidikan dapat dilihat bahwa sebagian besar masih banyak yang tergolong buta huruf. Sarana pendidikan yang masih sangat sedikit pun menunjukkan bahwa kepala kelurahan tidak memperhatikan bagaimana pertumbuhan di Kelurahan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Seksi Pendapatan, bahwa para kemampuan perangkat kelurahan khususnya kepala kelurahan tanggung jawab yang dimiliki masih kurang baik dalam mengadakan pembangunan, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan.

Dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan yang ada dalam diri masyarakat maka pembangunan akan secara mudah tercapai. Sikap yang demikian sangat diharapkan oleh setiap masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kelurahan. Selain menumbuhkan sikap kesatuan dan kesatuan, sikap dari seorang kepala lurah juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Masyarakat mengatakan bahwa sikap kepala kelurahan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena sikap kepala kelurahan belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diterimanya. Peningkatan lembaga kemasyarakatan ini tidak lepas dari adanya pemberian sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan partisipasi dalam pembangunan. Berbicara

mengenai sumberdaya tidak lepas dari tingkat pendidikan. Sumberdaya yang rendah yang dimiliki oleh setiap warga akan memperlambat peningkatan pembangunan sama halnya dengan Kelurahan Tangkahan Martubung yang masih kekurangan sumberdaya yang matang. Sangat diharapkan dengan adanya alokasi dana tersebut maka peningkatan lembaga kemasyarakatan pun terwujud karena lembaga tersebut yang menjadi wadah masyarakat dalam menyalurkan segala aspirasi dan rencana pembangunan ke depannya. Dengan adanya rencana-rencana pembangunan tersebut maka secara perlahan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat akan menunjukkan hasil dan mengalami pertumbuhan Kelurahan.

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Kelurahan Tangkahan Martubung

Pemerintahan Kelurahan Tangkahan Martubung akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Rendahnya kualitas SDM diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pertukaran informasi. Hal tersebut mempengaruhi pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat di Kelurahan Tangkahan Martubung. Minimnya pendidikan para masyarakat mengakibatkan para masyarakat di Kelurahan ini tidak secara cepat tanggap memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan pastinya organisasi akan mengalami masalah dan penghambat untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai Kepala Kelurahan seharusnya harus memiliki wawasan dan pendidikan yang cukup untuk mengatasi masalah dengan tanggap dan tepat namun kepala Kelurahan juga memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya.

Pembangunan kelurahan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik. Suatu pembangunan kelurahan akan dikatakan tepat sasaran atau terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses pembangunan kelurahan saat ini haruslah memperhatikan pembangunan yang berakar dari bawah, yaitu pembangunan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri dan menjadikan masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pembangunan yang dilakukan, dengan demikian pembangunan tersebut akan terpelihara.

Dengan demikian, maka untuk melihat kebenarannya dilapangan maka peneliti kembali mereview ulang wawancara dengan narasumber Masyarakat.

"Masyarakat memang kurang dilibatkan dalam pembangunan di kelurahan ini. Bukti keterlibatannya dengan mengajak para semua pihak untuk mengadakan rapat tentang apa-apa saja yang diperlukan di setiap dusunnya masing-masing. Tapi, mengenai dana-dana untuk pembangunan kami sebagai masyarakat merasa bahwa kepala kelurahan kurang

transparan dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan yang didapat dari pusat maupun dari pemko padangsidempuan tersebut. Seperti yang saya ketahui, hanya pembangunan posyandu dan parit saja yang ada sementara untuk bidang kesehatan dan pendidikan maupun transportasi masih minim".

Faktor yang khas yang memang menjadi faktor penghambat dalam kinerja implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Tangkahan Martubung adalah mengenai kecenderungan pelaksana. Faktor ini diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn. Kecenderungan pelaksana ini memang hampir sama dengan disposisi para pelaksana namun kecenderungan pelaksana ini lebih menekankan ke arah ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan begitu sebaliknya penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-

tindakan tersebut. Intensitas kecenderungan ini akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan.

Dana yang diterima seharusnya digunakan dalam mengelola kebutuhan dan pembangunan kelurahan namun kecenderungan pelaksana lebih mengutamakan ke arah kepentingan nya sendiri sehingga pembangunan di kelurahan tersebut tetap seperti itu dan tidak mengalami perkembangan. Seperti halnya dengan Kelurahan Tangkahan Martubung, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Walikota Medan mengenai dana Kelurahan bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana sehingga hal yang seharusnya diperkenankan tidak terlaksana. Hal ini disebabkan kurang jujurnya para implementor dalam menyalurkan dana tersebut ke tempatnya masing-masing. Seperti yang langsung diamati oleh peneliti mengenai perkembangan-perkembangan di lapangan. Masih adanya sifat primitive yang melekat di diri para implementor yang tidak mau menerima kemajuan. Selanjutnya mengenai masalah kapasitas yang merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan yang dilimpahkan untuk satu orang pegawai, informasi yang tidak

memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. Informasi yang diterima oleh Kelurahan Tangkahan Martubung sering mengalami keterlambatan misalnya saja cairnya dana yang diterima dari Kota. Menurut pengakuan narasumber dananya Melalui Kecamatan setiap tahun sering terlambat.

Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat dan optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan. Pemerintah kelurahan harus mampu mengajak para masyarakat agar memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan. Sekretaris Lurah mengatakan sangat

IVPENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan setelah diadakan analisa data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Kinerja Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Medan. Terkadang ada sesuatu hal yang harus diperbaiki dari dana tersebut tetapi digunakan untuk keperluan yang lain yang tidak terlalu membutuhkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi alokasi dana kelurahan dalam pembangunan kelurahan di

Kelurahan Tangkahan adalah sebagai berikut:

- a. Disposisi/sikap para pelaksana, sikap para pelaksana di Kelurahan Tangkahan belum dikategorikan baik karena kurangnya tanggungjawab, kurangnya transparan dan kurangnya konsistensi dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan sehingga para masyarakat tidak merasakan adanya perubahan dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Kota.
- b. Sumber daya, baik berupa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Aparat Kelurahan selaku implementor kebijakan ini masih belum memadai. Komunikasi yang diterima oleh masyarakat dari pelaksana kebijakan tidak jelas sehingga masyarakat tidak paham akan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Struktur Birokrasi: merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan.

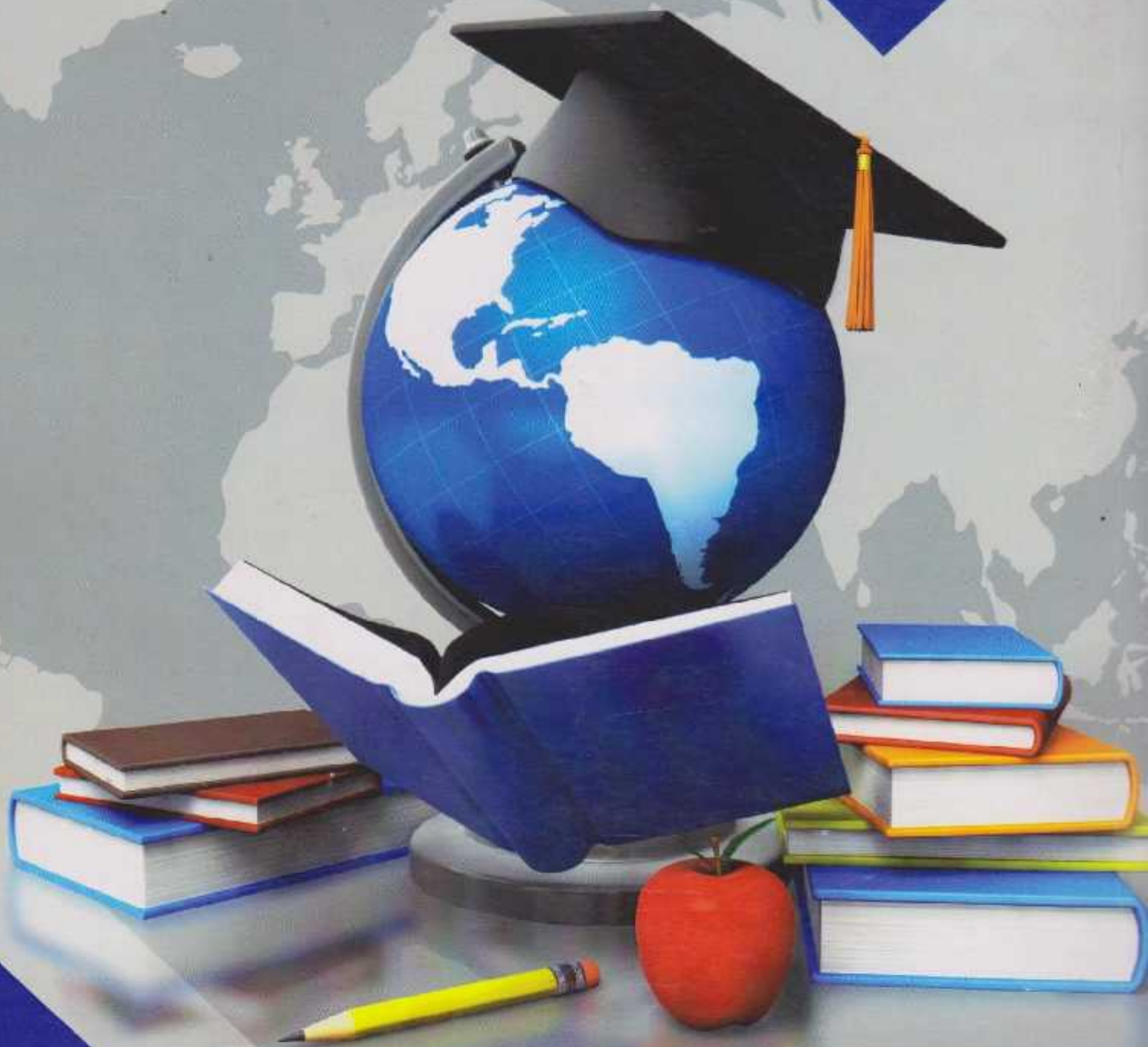
Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap implementasi kebijakan alokasi dana Kelurahan dalam pembangunan kelurahan di Kelurahan Tangkahan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Aparat Kelurahan Tangkahan disarankan untuk melaksanakan program sosialisasi antara para perangkat-perangkat kelurahan dalam meningkatkan pembangunan kelurahan. Sosialisasi dari setiap peraturan mengenai alokasi dana kelurahan tersebut seharusnya tetap diawasi dengan baik sehingga pembangunan dapat terwujud dan hendaknya sumber daya dalam implementasi kebijakan ini dapat dipenuhi, baik sumber daya manusia serta sumber daya non manusia. Dalam kesempatan ini peneliti merekomendasikan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi ekonomi dan memberikan sarana pendidikan kepada masyarakat agar taraf hidup masyarakat dapat menjadi lebih baik dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan.
2. Aparat Kelurahan Tangkahan dalam menghadapi dana kelurahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus mampu mengelola dana yang telah ditetapkan. Dana tersebut harus lebih mengutamakan bidang pendidikan agar tingkat pendidikan di Kelurahan Tangkahan Martubung semakin meningkat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Kepada masyarakat Kelurahan Tangkahan Martubung direkomendasikan agar lebih peduli terhadap lingkungannya dan mengubah pola pikir dimana selama ini beranggapan bahwa mereka cuek dengan pembangunan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan: IV
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana. Cetakan: II
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ESIndonesia. Cetakan: I
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. Cetakan: III
- Siagian, Sondang. 2011. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi Revisi. Cetakan: VI
- Suganda, Dann N. 1992. *Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar*. Jakarta: Arcan. Cetakan: I
- Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan: II
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wasistiono. Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia. Cetakan: I
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan : I



STINDO PROFESSIONAL JURNAL

Redaksi : Jl. Masjid Taufik No. 166 Medan, Telp. 0812 6363 020
Jl. Pernaungan No. 2 Medan. Telp. (061) 732 1118
Email : stindoprofesional@yahoo.com

ISSN : 2443-0536



9 772443 D53257